

STRATEGI IMPLEMENTASI MODEL PENGEMBANGAN WIRAUSAHAWAN MUDA BAGI MASYARAKAT PESISIR KABUPATEN TAKALAR

Abdul Rahman Rahim¹⁾, Ismail Rasulong²⁾, Edi Jusriadi³⁾, Faidul Adzim⁴⁾

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar

ABSTRACT

The aims of the research are: (1) reviewing and analyzing the strategy of applying the model of developing young entrepreneurs through the container of a business incubator. (2) the role and commitment of the actors (government, financial institutions, youth professional organizations, village government, community leaders, youth organizations, and private sector) in a broader partnership network to support the implementation of young entrepreneurship in development models through the container of a business incubator for coastal communities.

The data collection through in-depth interviews, potential mapping, and focus group discussions with the stakeholder, in this case, the main actors of development includes government, financial institutions, professional organizations of young entrepreneurs, community leaders, youth organizations, and private parties including universities. This qualitative research data analysis activity is done interactively and continuously until complete through several steps of activity systematically, that is collection/ data record, data reduction, data presentation, Verification and drawing the Conclusion.

The conclusions of this research are the formulation of trial strategy in applying the young entrepreneur development model through the container of a business incubator. Start by the strengthening of commitment among the actors, the formulation of a module for training, the formation of planning action, forming the team, training module, module for mentoring, and each of the main actors for a business incubator. The next step is doing an inventory of prospective new entrepreneurs and beginner entrepreneurs who will be fostered and developed through the container of a business incubator. The Structured training is for new groups of entrepreneurs and starting-up the new entrepreneurs from youth groups. The mentoring of business groups that initiated from the training results, and business incubators in bridging new business groups for access to capital and market access.

Keywords : Coastal Communities, Young Entrepreneurs, Business Incubators

Correspondence to : rahman.rahim@unismuh.ac.id, ismail.rasulong@unismuh.ac.id,
edi.jusriadi@unismuh.ac.id, faidul.adzim@unismuh.ac.id

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini, yaitu: (1) mengkaji dan menganalisis strategi penerapan model pengembangan wirausahawan muda melalui wadah inkubator bisnis; (2) menganalisis peran dan komitmen lintas aktor (pemerintah, lembaga keuangan, organisasi profesi pengusaha muda, pemerintah desa, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, dan pihak swasta) dalam jaringan

kemitraan yang lebih luas untuk mendukung implementasi model pengembangan wirausahawan muda melalui wadah inkubator bisnis bagi masyarakat pesisir.

Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan focus group discussion (FGD) dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini aktor utama pembangunan meliputi pemerintah, lembaga keuangan, organisasi profesi pengusaha muda, pemerintah desa, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, dan pihak swasta termasuk perguruan tinggi. Analisis data penelitian menggunakan metode kualitatif yang dilakukan melalui beberapa langkah secara sistematis, yakni Koleksi/Catatan data, Reduksi data, Penyajian data, Verifikasi dan penarikan kesimpulan.

Simpulan dari penelitian ini adalah Rumusan strategi uji coba penerapan model pengembangan wirausahawan muda melalui wadah inkubator bisnis harus dimulai dengan adanya peneguhan komitmen antar lintas aktor, perumusan modul pelatihan, pembentukan tim penyusun rencana aksi, modul pelatihan, modul pendampingan, dan penyusunan detail peran masing-masing aktor utama inkubator bisnis. Selanjutnya melakukan inventarisasi calon-calon wirausahawan baru dan wirausahawan pemula yang akan dibina dan dikembangkan melalui wadah inkubator bisnis. Pelatihan terstruktur bagi kelompok wirausahawan baru dan wirausahawan pemula dari kelompok pemuda. Pendampingan kelompok-kelompok usaha yang telah digagas dari hasil pelatihan, dan pihak inkubator bisnis menjembatani kelompok-kelompok usaha baru untuk akses permodalan dan akses pasar.

Kata kunci : Penerapan Model, Wirausahawan Muda, Inkubator Bisnis, Masyarakat Pesisir

Korespondensi : ismail.rasulong@unismuh.ac.id, edi.jusriadi@unismuh.ac.id, faidul.adzim@unismuh.ac.id

PENDAHULUAN / INTRODUCTION

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memberdayakan masyarakat pesisir khususnya kaum mudanya adalah mendorong mereka untuk memiliki kemampuan mengidentifikasi peluang usaha di bidang pengelolaan sumber daya laut dan perikanan. Hasil observasi awal yang dilakukan menunjukkan rata-rata kepala keluarga memiliki tanggungan 4-7 orang sementara pendapatan mereka tidak menentu karena banyak tergantung pada faktor cuaca serta tingginya operasional untuk melaut, apalagi kebanyakan keluarga nelayan hanya sebagai buruh saja (sawi-bahasa Makassar) sehingga hasil tangkapan yang diperoleh harus dibagi dengan punggawa atau pemilik perahu. Di tiap rumah tangga, rata-rata memiliki anak usia produktif yang sudah tidak sekolah lagi (tamatan SMP atau SMA) dengan kegiatan utama hanya turut membantu

orang tua untuk melaut, bahkan ada yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Padahal sesungguhnya di sekitar lingkungannya banyak potensi yang bisa dikembangkan, seperti di bidang pengalengan, pengasinan, pengelolaan abon, dan berbagai bidang usaha lainnya yang prospektif dan bisa dikelola dalam skala industri rumah tangga.

Hasil penelitian Rasulong, et. al (2016) menemukan bahwa:

1. Sebaran sumber daya ekonomi yang dapat dikembangkan di wilayah pesisir Kabupaten Takalar cukup beragam. Namun belum ada upaya maksimal yang sedang dilakukan untuk memanfaatkannya secara optimal.
2. Potensi bidang usaha yang dapat dikembangkan oleh kaum muda di wilayah pesisir Kabupaten Takalar

sangat prospektif. Walaupun saat ini masyarakat lebih dominan fokus pada penangkapan ikan semata, belum ada upaya maksimal untuk mengembangkan kegiatan usaha pada skala mikro, kecil, ataupun menengah pada pengolahan hasil laut.

3. Pemerintah daerah dan pemerintah desa di wilayah Pesisir Kabupaten Takalar telah memberikan perannya untuk memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat termasuk kaum muda, tetapi belum optimal karena program yang dilaksanakan relatif disalah artikan oleh kelompok penerima manfaat sehingga efektifitas keberlanjutannya tidak terjamin.
4. Model pengembangan wirausahawan muda dibangun dalam suatu kerangka yang integratif dengan melibatkan seluruh aktor utama di daerah, termasuk melibatkan perguruan tinggi dalam wadah inkubator bisnis untuk mempersiapkan, mengasesment, mendampingi, melatih, dan membantu kelompok-kelompok bisnis pemuda untuk start up bisnis dalam skala mikro, kecil, dan menengah.

Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mengujicobakan implementasi model melalui wadah inkubator bisnis. Peran lintas aktor dalam hal ini pemerintah daerah, lembaga keuangan, organisasi profesi pengusaha muda, pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pihak swasta, dan termasuk perguruan tinggi akan didalami dan menemukan formulasi terbaik termasuk kendala dan faktor-faktor pendukung yang memungkinkan model pengembangan wirausahawan muda bagi masyarakat pesisir dapat diimplementasi secara optimal. Ujicoba

implementasi model di tahun kedua ini akan dilakukan berbarengan dengan pengamatan yang mendalam terkait berfungsi tidaknya para pemangku kepentingan dalam wadah inkubator bisnis yang disepakati. Pada tahap lanjutan, model dan metode tersebut akan diaplikasikan, didampingi pelaksanaannya, kemudian melakukan revisi dan perbaikan lebih lanjut. Pada akhirnya diharapkan akan lahir wirausahawan-wirausahawan muda khususnya dalam bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menjadi rintisan untuk melahirkan inkubator-inkubator penyebar “virus wirausaha” di lingkungan sekitarnya.

KAJIAN LITERATUR

Pengertian wilayah pesisir adalah merupakan wilayah peralihan antara laut dan daratan, ke arah darat mencakup daerah yang masih terkena pengaruh percikan air laut atau pasang surut, dan ke arah laut meliputi daerah paparan benua (continental shelf) (Dahuri, dkk, 2001). Lebih lanjut Bengen (2001) mengemukakan wilayah pesisir sebagai wilayah daratan yang berbatasan dengan laut, batas di daratan meliputi daerah-daerah yang tergenang air maupun yang tidak tergenang air yang masih dipengaruhi oleh proses-proses laut seperti pasang surut, angin laut dan intrusi garam, sedangkan batas di laut ialah daerah-daerah yang dipengaruhi oleh proses-proses alami di daratan seperti sedimentasi dan mengalirnya air tawar ke laut, serta daerah-daerah laut yang dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan manusia di daratan.

Beberapa hasil penelitian tentang kehidupan ekonomi masyarakat pesisir, di antaranya Wasak (2012) menemukan bahwa bahwa rumahtangga nelayan yang pekerjaannya semata-mata tergantung pada usaha menangkap ikan memperoleh pendapatan yang hanya mampu memenuhi

kebutuhan hidup mereka sehari-hari, dan jika ada uang yang tersisa, itu biasanya digunakan untuk biaya sekolah anak, membeli pakaian, dan memperbaiki tempat tinggalnya. Temuan studi pada berbagai komunitas nelayan di luar negeri menunjukkan bahwa organisasi sosial ekonomi maupun lembaga terkait lainnya yang ada di desa pesisir memegang peranan penting dalam perbaikan taraf hidup masyarakat pesisir. Dengan kata lain bahwa organisasi sosial ekonomi bisa menjadi penunjang dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat pesisir. Tanpa organisasi sosial ekonomi, nelayan akan bekerja dan hidup sendirian tanpa ada yang memperjuangkan dan melindungi kepentingan mereka (Mantjoro, 1988).

Beberapa upaya pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga arah, seperti yang dikatakan Kartasmita (1996) dalam Zubaedi (2013), yaitu :

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk dapat berkembang (enabling). Hal ini berarti, menyadarkan setiap individu maupun masyarakat bahwa mereka memiliki potensi, tidak ada masyarakat yang tidak memiliki daya. Sehingga ketika dalam pelaksanaan pemberdayaan, diupayakan untuk mendorong dan membangkitkan motivasi masyarakat akan pentingnya mengembangkan potensi-potensi yang telah ada dan dimiliki oleh masyarakat.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering). Hal ini berarti bahwa langkah pemberdayaan dapat diupayakan melalui kegiatan/aksi nyata seperti pendidikan, pelatihan, peningkatan kesehatan, pemberian modal, lapangan pekerjaan, adanya

informasi, pasar, dan infrastruktur lainnya, serta membuka akses pada berbagai peluang lainnya yang mampu masyarakat lebih berdaya. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, melainkan juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban.

3. Melindungi masyarakat (protection). Artinya dalam pemberdayaan masyarakat, perlu adanya upaya langkah-langkah yang dapat mencegah persaingan yang tidak seimbang maupun praktik eksploitasi oleh kaum/pihak yang kuat terhadap kaum/pihak yang lemah, melalui keberpihakan atau adanya aturan atau kesepakatan yang jelas untuk melindungi pihak yang lemah.

Program pemberdayaan masyarakat yang tergolong ke dalam kelompok marginal sesungguhnya bukanlah sesuatu yang baru. Pemerintah sejak lama telah menaruh perhatian dengan meluncurkan berbagai program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh berbagai kementerian dan lembaga. Salah satu yang terkenal adalah Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat miskin melalui pengembangan sumberdaya manusia, modal, dan usaha produktif serta pengembangan kelembagaan. Lingkup dari program IDT menyangkut kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di desa-desa tertinggal. Akselerasi kegiatan sosial ekonomi dilakukan melalui pengembangan sumberdaya ekonomi di pedesaan, suplai kebutuhan dasar, pelayanan jasa, dan penciptaan lingkungan pendukung bagi proses pengentasan kemiskinan.

Program IDT, selain memberikan dukungan dana 20 juta per desa tertinggal, juga memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan, supervisi dan tenaga pendamping. Lebih dari itu, program IDT juga membantu mengembangkan infrastruktur seperti jalan, jembatan, air bersih dan kebutuhan lainnya sesuai dengan kondisi pedesaan.

METODE PENELITIAN/ METHODS

1. Jenis dan Fokus Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian terapan yang ditujukan untuk menemukan model terbaik sekaligus mengimplementasikannya di lokus penelitian maupun di wilayah-wilayah lainnya dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Fokus utama penelitian pada 4 (empat) desa pesisir yaitu (1) untuk Kecamatan Galesong meliputi Desa Boddia, dan Desa Palalakkang. (2) untuk Kecamatan Galesong Utara meliputi Desa Tamasaju, dan Desa Tamalate.

2. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara dengan beberapa informan kunci di setiap desa sasaran.
- b. Melakukan FGD (*Focus Group Discussion*), melalui diskusi kelompok terfokus dimaksudkan untuk lebih mendalami beberapa isu dan data yang tidak terjaring dalam wawancara mendalam, akan diperdalam lagi pada kegiatan FGD bersama dengan tokoh masyarakat dan tokoh pemuda serta aparat pemerintahan desa.
- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang ada dan informasi lainnya.

3. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Kegiatan analisis data penelitian kualitatif ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas melalui beberapa langkah kegiatan secara sistematis, yakni *data collection*, *data reduction*, *data display*, *conclutions (drawing/verifying)*.

HASIL DAN PEMBAHASAN/ RESULTS

1. Strategi Implementasi Model

Pertama, pemerintah daerah harus berperan memberi ruang yang lebih luas dan berkelanjutan untuk mendorong tumbuhnya wirausahawan-wirausahawan muda. Profil masyarakat pesisir khususnya di wilayah studi mengisyaratkan dibutuhkannya sentuhan kebijakan khusus yang berbasis pada kebijakan ekonomi yang berpihak pada tumbuhnya inisiatif, kreasi, dan motivasi untuk berwirausaha bagi kalangan muda. Kebijakan ini harus melibatkan aktor lokal seperti lembaga keuangan, organisasi profesi bisnis pemuda, dan para juragan kapal tangkap (*papalele* – bahasa Makassar) untuk secara bersama-sama memberi ruang yang lebih luas bagi kaum muda untuk mengkreasi ide-ide bisnis mereka melalui penguatan kelembagaan inkubator bisnis di wilayah pesisir.

Kedua, lembaga keuangan (bank dan non bank) melalui kebijakan pemerintah daerah harus mengambil peran melalui inisiasi adanya kredit program yang khusus diperuntukkan bagi tumbuhnya usaha kecil dan mikro di wilayah pesisir. Untuk aktor kedua, yaitu lembaga keuangan dapat berfungsi sebagai mitra yang saling menguntungkan dengan usaha bisnis yang akan dibangun. Posisi lembaga keuangan bersifat “menunggu” rekomendasi dari inkubator bisnis terkait usaha bisnis apa yang

bisa dibiayai melalui kredit program dari lembaga keuangan. Rekomendasi dari inkubator menjadi jaminan bagi bank tentang kelayakan usaha dari kelompok atau individu pemuda yang akan start up bisnis.

Ketiga, organisasi profesi bisnis pemuda yang dalam konteks ini adalah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Organisasi ini bertugas untuk mendorong sekaligus membantu usaha-usaha bisnis pemuda yang baru akan start up (memulai) untuk menjangkau pasar yang lebih luas, juga terkait dengan pendampingan dan pembimbingan usaha melalui program yang berkesinambungan. HIPMI dalam fungsinya sebagai organisasi profesi bisnis bagi pemuda, dapat menjadi “ayah angkat” bagi bisnis-bisnis pemuda yang baru akan dimulai.

Keempat, tokoh masyarakat dan organisasi kepemudaan dalam hal ini adalah Papalele (Juragan Kapal) dan Karang Taruna ikut terlibat dalam wadah inkubator bisnis yang dibentuk. Peran Papalele menjadi salah satu bentuk kelompok local wisdom (kearifan lokal) yang harus didorong untuk mengambil bagian mendorong tumbuhnya kesadaran kaum muda untuk memulai bisnisnya. Upaya dimaksud adalah dengan memberikan ruang yang lebih luas dengan memberi peluang kepada kaum muda untuk ikut dalam alur bisnis yang selama ini mutlak dalam penguasaan kelompok Papalele di kawasan pesisir. Sementara kelompok pemuda seperti organisasi Karang Taruna, berperan untuk memperluas jangkauan tugasnya tidak hanya dalam bentuk kegiatan sosial tetapi juga mengembangkan tanggung jawabnya dalam bentuk mengorganisir kaum muda untuk berkreasi dalam bidang bisnis yang riil.

Keempat aktor utama tersebut masing-masing melakukan perannya dalam satu wadah atau lembaga yang dibentuk dalam hal ini adalah Pusat Inkubator Bisnis Wilayah Pesisir. Lembaga ini dikelola oleh orang-

orang yang dianggap kompeten melalui kebijakan pemerintah daerah dengan melibatkan unsur-unsur pemerintah dan pemuda di dalamnya. Pada prinsipnya, fungsi inkubator bisnis adalah wadah yang bisa memfasilitasi lahirnya ide-ide bisnis kreatif dari kaum muda termasuk di dalamnya melakukan kegiatan/kampanye yang bisa mendorong terjadinya perubahan pola pikir (mindset) kaum muda, memfasilitas kegiatan coaching dan mentoring, penilaian kelayakan usaha, pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan bagi bisnis-bisnis potensial bagi kaum muda di wilayah pesisir. Oleh karena itu, pelibatan perguruan tinggi dalam Inkubator Bisnis dimaksudkan agar sumber daya untuk kegiatan pelatihan, coaching dan mentoring termasuk penilaian kelayakan bisnis dilakukan bersama-sama dengan perguruan tinggi sehingga hasilnya bisa lebih dipertanggung jawabkan.

Jika seluruh aktor utama tersebut terlibat dalam lembaga Inkubator Bisnis dimaksud maka akses permodalan dan akses pasar akan bisa dilakukan dengan lebih mudah dan terintegrasi. Oleh karenanya lahirnya kebijakan dari pemerintah daerah untuk bisa mendorong dan mengajak lembaga-lembaga keuangan untuk mengambil peran untuk menumbuhkan usaha-usaha pada skala mikro dan kecil di wilayah pesisir akan memberikan harapan bahwa kegiatan-kegiatan usaha mikro dan kecil dapat tumbuh signifikan dan berkelanjutan di masa yang akan datang.

Kerangka model yang dihasilkan tersebut selanjutnya dikonfirmasi ke pemangku kepentingan dalam hal ini adalah aktor-aktor utama yang diharapkan berperan aktif dalam wadah inkubator bisnis tersebut. Oleh karena itu, langkah awal yang dilakukan adalah melakukan wawancara mendalam dengan para pihak untuk mendalami sekaligus menetapkan strategi penerapan

model agar bisa diterapkan di wilayah penelitian.

Rencana aksi implementasi model pengembangan wirausahawan muda melalui wadah inkubator bisnis sebagai berikut:

1. Penguatan komitmen para aktor utama pembangunan untuk sama-sama terlibat dalam lembaga inkubator bisnis melalui penandatanganan kesepakatan bersama pembentukan inkubator bisnis pesisir Takalar.
2. Pembentukan tim penyusun rencana aksi, modul pelatihan, modul pendampingan, dan penyusunan detail peran masing-masing aktor utama inkubator bisnis.
3. Inventarisasi calon-calon wirausahawan baru dan wirausahawan pemula yang akan dibina dan dikembangkan melalui wadah inkubator bisnis.
4. Pelatihan terstruktur bagi kelompok wirausahawan baru dan wirausahawan pemula dari kelompok pemuda.
5. Pendampingan kelompok-kelompok usaha yang telah digagas dari hasil pelatihan.
6. Pihak inkubator bisnis menjembatani kelompok-kelompok usaha baru untuk akses permodalan dan akses pasar.

Poin-poin yang disarikan dalam kegiatan FGD tersebut merupakan langkah-langkah yang harus ditindaklanjuti secara bertahap. Sebagai langkah awal maka peneguhan komitmen para aktor utama harus dilakukan bertujuan mensinergikan semua aktor untuk bisa secara aktif mengambil peran dan tanggung jawab untuk secara bersama-sama melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan penumbuhan wirausahawan-wirausahawan baru sekaligus juga untuk mengembangkan bisnis dan jaringan bagi wirausahawan-wirausahawan pemula melalui konsep dan strategi bisnis yang lebih baik.

2. Peran dan Komitmen Lintas Aktor

Upaya menciptakan wirausahawan muda khususnya di wilayah pesisir yang memiliki kekayaan sumber daya laut yang melimpah menjadi tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, kepekaan akan adanya potensi yang bisa dioptimalkan harus diikuti oleh kemauan untuk secara bersama mendorong bangkitnya motivasi masyarakat pesisir untuk mau tahu dan mampu melakukan kegiatan menambah nilai tambah (value added) dari produk-produk kegiatan perikanan laut yang ada di sekitarnya. Bidang-bidang usaha potensial yang dapat dilakukan tidak hanya berfokus pada hasil perikanan tangkap semata tetapi juga bisa dikembangkan pada aspek lain yang memiliki kaitan langsung dengan produk perikanan baik yang bersifat ke depan maupun yang memiliki efek ke belakang. Dalam arti bahwa banyak sekali kegiatan usaha yang bisa dilakukan yang dapat saling mendukung di sektor perikanan laut.

Aktor utama dalam upaya menciptakan wirausahawan muda yang dimaksudkan dalam penelitian ini diidentifikasi adalah pemerintah daerah, pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, lembaga keuangan, pelaku industri, dan perguruan tinggi. Ketujuh aktor dimaksud idealnya dapat mengambil peran untuk berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, lebih khusus melalui pengembangan wirausahawan muda. Mengapa wirausahawan muda?, karena berdasarkan data-data awal yang telah dipaparkan bahwa anak-anak nelayan di desa-desa pesisir Kecamatan Galesong dan Kecamatan Galesong Utara tidak banyak yang dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi karena faktor ekonomi, dan karena itu mereka umumnya ikut terlibat “secara terpaksa” dalam kegiatan melaut yang dilakukan orang tuanya. Ketidakmampuan menangkap peluang untuk memanfaatkan potensi sumber daya perikanan laut yang tergolong relatif

melimpah tersebut disebabkan oleh karena tidak adanya sistem yang secara komprehensif, sistematis dan massif untuk mendorong kelompok penduduk usia muda tersebut untuk masuk dalam kegiatan produktif bernilai tambah.

Pemberian kebijakan pembangunan yang menyentuh langsung kepada masyarakat bukanlah hal yang untuk mudah dilakukan. Chandra dalam kurnadi (2007;16) menjelaskan bahwa inisiatif untuk menggugah partisipasi masyarakat dalam pembangunan local sering merupakan intervensi pihak luar ke dalam masyarakat atau komuniti setempat dan harus memperhatikan karakter, cara dan kapasitas kaum miskin. Pada dasarnya setiap golongan masyarakat termasuk masyarakat miskin, masih memiliki potensi sumber daya social yang bisa didayagunakan untuk mengatasi kemiskinan. Sumber daya social yang berupa system nilai, norma-norma perilaku, dan kepercayaan local telah terbukti mampu menjaga integrasi masyarakat pesisir (Kurnadi, 2007). Fukuyama (1997) menjelaskan modal social sebagai kemampuan efektif dan lentur dalam menghadapi perubahan yang berlangsung cepat karena intervensi kapitalisme pada berbagai sector kehidupan masyarakat. Modal social yang memiliki unsur kepercayaan (trust), norma (norm), jaringan (network), dan reciprocity (hubungan timbal balik) adalah sumber daya social yang terdapat dalam kelompok kerja atau relasi social patron client yang terdapat dalam kehidupan masyarakat pesisir antara juragan atau pemilik modal dengan para nelayan buruhnya. Arah kebijakan pembangunan dalam masyarakat pesisir yang memutus rantai relasi social antara Juragan dan para nelayan buruhnya sehingga menciptakan nelayan buruh menjadi masyarakat mandiri, menurut saya adalah hal yang salah. Karena tingkat kepercayaan yang tinggi nelayan buruh terhadap juragannya

telah menjadi budaya dalam kehidupan masyarakat pesisir yang sangat susah untuk diubah.

Dalam konteks pembangunan masyarakat masyarakat di kawasan pesisir Kabupaten Takalar, idealnya merupakan bauran kebijakan antara kebijakan ekonomi, kebijakan sumber daya alam dan kebijakan kelembagaan yang bersinergis dan terintegrasi satu sama lainnya. Arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pesisir yang dilakukan pemerintah seharusnya melibatkan semua aspek yang terdapat dalam masyarakat pesisir. Kebijakan pemanfaatan kelembagaan yang telah ada dalam masyarakat pesisir dalam hal ini yang dibentuk akibat dari relasi social patron klien antara juragannya dan nelayan buruhnya seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik.

Menurut hasil pengamatan di lapangan, keberadaan aktor tokoh masyarakat dalam hal ini orang-orang yang memiliki pengaruh kuat terhadap komunitas masyarakat nelayan yaitu juragan, diperoleh fakta bahwa sesungguhnya terdapat relasi sosial Juragan dan nelayan buruhnya sesungguhnya memiliki akar modal sosial yang kuat, sehingga kebijakan pembangunan masyarakat di kawasan pesisir dapat melalui peran dari Juragan atau pemilik Modal. Tingkat kepercayaan yang tinggi nelayan buruh terhadap Juragannya dan norma yang telah tersedia dalam relasi sosial tersebut, merupakan modal yang baik dalam memasukkan kebijakan-kebijakan pembangunan kepada nelayan buruh untuk lebih meningkatkan taraf hidupnya dengan kata lain, Juragan bisa menjadi jembatan antara para stekholder penentu arah kebijakan dan nelayan buruh sebagai objek arah kebijakan pembangunan. Juragan dalam masyarakat pesisir bisa berperan sebagai lembaga perbankan yang dapat memberikan jaminan baik dalam modal maupun sosial

kepada para nelayan buruhnya sehingga dapat menciptakan investasi modal yang dapat dimanfaatkan kelak oleh para nelayan buruhnya dan secara tidak langsung pola pikir masyarakat pesisir yang bersifat konsumtif akan bergeser secara perlahan berganti menjadi pola pikir untuk menabung.

Kenyataan bahwa potensi daerah pesisir yang sangat besar tidak didukung infrastruktur yang baik, kesempatan kerja yang luas, dan tentunya jiwa wirausaha pada individu masyarakatnya. Padahal, secara sosial budaya, masyarakat yang mayoritas nelayan tangkap tersebut, merupakan orang-orang yang ramah dan sangat terbuka. Namun terdapat sedikit masalah yakni sulitnya untuk menggerakkan, apalagi mengubah kebiasaan menangkap menjadi budidaya.

Dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Takalar, pemerintah yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat nelayan tersebut mempunyai peran berbeda-beda, semua berperan sesuai dengan kapasitas masing-masing lembaga. Pertama, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar merupakan penanggungjawab semua program yang telah digulirkan pemerintah kepada nelayan pada tingkat kabupaten. Sebagai pelaksana teknis, dinas sebagai penyelenggara program mempunyai peran sebagai penentu kebijakan dalam bidang perikanan termasuk dalam pemberdayaan masyarakat nelayan. Dalam penentuan kebijakan, dinas cenderung otoriter, dinas terlalu dominan dalam menentukan kebijakan tanpa melibatkan peran serta masyarakat, akibatnya masyarakat sekedar menjalankan saja walaupun kemungkinan kurang tepat untuk kondisi spesifik masyarakat setempat. Hal semacam ini seringkali terjadi dan tentu saja pencapaian tujuan seringkali tidak tercapai secara optimal. Hal ini dapat diartikan bahwa peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Kabupaten Takalar khususnya di wilayah

studi sangat dominan, peran dominan pemerintah menyebabkan gagalnya sebuah pemberdayaan masyarakat. Program ini cenderung bersifat top-down, yang cenderung tidak memberi ruang yang cukup bagi kelompok-kelompok masyarakat berperan karena kebijakan pemberdayaan tidak memperhatikan apa yang sesungguhnya kelompok masyarakat butuhkan.

Terkait dengan komitmen aktor utama yang diharapkan berperan dalam inkubator bisnis maka nota kesepahaman menjadi unsur yang penting untuk dihasilkan. Namun mendudukkan mereka dalam satu meja dan merumuskannya menjadi tantangan bagi peneliti. Kendala waktu seringkali menjadi alasan sehingga mereka tidak bisa duduk semeja, apalagi dari pihak lembaga perbankan yang memiliki mekanisme yang tidak mudah sehingga dibutuhkan komitmen pemerintah Kabupaten Takalar untuk mendorong hal tersebut.

SIMPULAN/ CONCLUSSION

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Rumusan strategi uji coba penerapan model pengembangan wirausahawan muda melalui wadah inkubator bisnis harus dimulai dengan adanya peneguhan komitmen antar lintas aktor, perumusan modul pelatihan, pembentukan tim penyusun rencana aksi, modul pelatihan, modul pendampingan, dan penyusunan detail peran masing-masing aktor utama inkubator bisnis. Selanjutnya melakukan inventarisasi calon-calon wirausahawan baru dan wirausahawan pemula yang akan dibina dan dikembangkan melalui wadah inkubator bisnis. Pelatihan terstruktur bagi kelompok wirausahawan baru dan wirausahawan pemula dari kelompok pemuda. Pendampingan kelompok-kelompok usaha yang telah digagas dari hasil pelatihan, dan pihak

inkubator bisnis menjembatani kelompok-kelompok usaha baru untuk akses permodalan dan akses pasar.

2. Komitmen para aktor utama inkubator bisnis khususnya pihak pemerintah daerah, para kepala desa, HIPMI, Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa, dan Pihak Perguruan Tinggi sangat baik dan akan ditindaklanjuti melalui penandatanganan nota kesepahaman pengembangan wadah inkubator bisnis.

DAFTAR PUSTAKA / BIBLIOGRAPHY

- Arief, Andi Adrie, 2008. Partisipasi Masyarakat Nelayan di Kabupaten Takalar (Studi Kasus Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara). Jurnal Hutan dan Masyarakat Vol. III No. 1 Mei 2008.
- Dendi, Astia, Heinz-Josef Heile, Mahman, Rukyatil Hilaliyah, Rifai Saleh Haryono. 2004. Menanggulangi Kemiskinan Melalui Pengembangan Ekonomi Lokal Beberapa Pelajaran dari Nusa Tenggara. Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- Indarti, I., & Wardana, D. S. (2013). Metode Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Penguatan Kelembagaan Di Wilayah Pesisir. BENEFIT Jurnal Manajemen dan Bisnis, 17(1), 75-88.
- Mantjoro, E. 1988. Social and economic organization of rural Japanese fishing community: A Case of Nomaik. Master program, Department of Fisheries, Tokyo University, Japan (unpublished).
- Moleong, Lexy J. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Rahman, Abdul, and Ismail Rasulong. 2015. Empowerment of Creative Economy to

Improve Community Incomes in Takalar Regency. IOSR Journal of Business and Management Ver. V 17, no. 4: 2319-7668. www.iosrjournals.org.

- Syahza, Almasdi. 2003. Rancangan Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan Berbasis Agribisnis di Daerah Riau. Jurnal Pembangunan Pedesaan, Volume 3 No. 2.
- Trisbiantoro, Didik, dkk. 2013. Model Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Jurnal Mitra Ekonomi dan Manajemen Bisnis, Vol 4 No. 1 hal. 18-29.
- Wasak, Martha. 2012. Keadaan Sosial-Ekonomi Masyarakat Nelayan di Desa Kinabuhutan Kecamatan Likupang Barat. Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Pacific Journal, Vol. 1 (7): 1339 -1342.
- Wickham, A.P. 2001. Strategic Entrepreneurship: A Decision Making Approach to New Venture Creation and Management. 2nd edition. Pearson Education Limited. Harlow, England.
- Widjajanti, Kesi. 2011. Model Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol. 12, (No.01):15-27.
- Yatmo, Mardi Hutomo. 2000. Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoretik dan Implementasi, Naskah No. 20.
- Yuliana, Rita. 2010. Model Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Pengembang Ekonomi Lokal Melalui Sistem Kemitraan Bisnis Islam Berbasis Mompreneur. Pamator, Volume 3, Nomor 2, hal. 128-136.
- Yustika, Ahmad Erani. 2010. Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori, Strategi, Edisi 2. Malang: Penerbit Bayumedia.
- Zubaedi. 2013. Pengembangan Masyarakat, Wacana dan Praktik. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.